



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD ASHARI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
3. NHK : 979743

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.100.000.000

1. Tanah Seluas 215 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m²/54 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/70 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELOZ M/T 1500 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT A/T 110 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 71.493.248

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.415.493.248

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.415.493.248



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.